

Dampak Buruk Konflik bagi Sektor Kelapa Sawit

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konflik sosial berdampak sangat signifikan terhadap perusahaan kelapa sawit

Jakarta, 18 Januari 2017 - "Kami menyimpulkan bahwa biaya yang terakumulasi akibat konflik sosial sangat signifikan dan berpotensi menghambat produktivitas perusahaan. Namun, seringkali biaya ini diabaikan, padahal juga dapat merugikan komunitas dan pemerintah daerah," demikian dinyatakan dalam laporan penelitian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya yang ditimbulkan akibat konflik sosial di sektor kelapa sawit. Aisyah Sileuw, Presiden Direktur Daemeter, salah seorang pelaksana penelitian tersebut mengatakan, "Kami ingin memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak konflik sosial terhadap perusahaan kelapa sawit dengan cara menghitung seluruh biaya langsung dan tidak langsung, termasuk nilai kerugian aset berwujud maupun tak berwujud."

Hasil kajian beberapa studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian berwujud yang langsung dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik sosial dapat mencapai 2.500.000 dolar AS, mewakili 51% hingga 88% dari biaya operasional perkebunan kelapa sawit, atau 102% hingga 177% dari biaya investasi per hektar per tahun. Kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut.

Penelitian ini juga memperlihatkan kerugian biaya "tersembunyi" (*intangible*) yang mencapai 9.000.000 dolar AS berupa kerugian tidak langsung akibat risiko konflik yang berulang atau konflik yang memburuk, kerugian akibat memburuknya reputasi bisnis dan risiko kekerasan terhadap harta benda dan manusia.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyambut baik temuan penelitian ini sebagai panggilan bagi dunia usaha untuk bertindak. "Meningat tingginya kerugian yang diderita perusahaan yang terlibat dalam konflik lahan, sangatlah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pencegahan, penanganan serta penyelesaian konflik", demikian disampaikan Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional KADIN dan Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).

"Penelitian ini secara jelas menunjukkan bagaimana konflik sosial berdampak bagi perusahaan kelapa sawit dan diharapkan dapat membantu para eksekutif dan jajaran manajerial untuk membuat kebijakan dan keputusan operasional yang lebih baik untuk menghindari dan mengelola konflik," kata Aisyah Sileuw. Meskipun penelitian ini tidak mengungkapkan biaya akibat konflik bagi masyarakat maupun pemerintah namun diakui biaya kerugian tersebut sangatlah signifikan.

"Meskipun dengan ukuran sampel yang kecil dan lingkup yang sempit, temuan kami mengindikasikan bahwa konflik sosial berdampak secara signifikan, tidak dipahami dengan baik dan berpotensi menghambat produktivitas perusahaan, masyarakat dan pemerintah serta negara Indonesia secara keseluruhan," ujar Aisyah Sileuw.

Penelitian "The Cost of Conflict in Palm Oil in Indonesia" dilaksanakan oleh Daemeter Consulting untuk Conflict Resolution Unit (CRU) IBCSD. Penelitian ini memiliki fokus untuk menghitung nilai finansial akibat konflik-konflik sosial yang dialami lima perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema umum seputar konflik sosial sektor kelapa sawit. Di dalamnya mencakup terkurasnya sumber daya; tanah (dan mata pencaharian) adalah penyebab utama konflik sosial sektor kelapa sawit; sengketa cenderung tidak dimulai dengan kekerasan; konflik sering terulang; dan konflik cenderung terjadi pada fase produksi.

Beberapa rekomendasi penting penelitian ini antara lain, perusahaan-perusahaan kelapa sawit perlu memperbaiki kebijakan dan prosedur manajerial terkait konflik; perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab, perkembangan, dan implikasi konflik sosial; serta perlunya dikembangkan praktik-praktik terbaik pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik.

“CRU menyambut baik temuan penelitian ini,” ujar Navitri Putri Guillaume, Program Director CRU/IBCSD. “Terutama rekomendasi pengembangan praktik-praktik yang lebih baik dalam resolusi konflik. Penelitian ini memang hanya menyentuh bagian permukaan dari permasalahan terkait kerugian akibat konflik, dan masih jauh lebih banyak lagi informasi yang dibutuhkan. Saat ini kami sedang mengembangkan layanan untuk mendukung mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.”

Conflict Resolution Unit (CRU) didirikan untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa mediasi merupakan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam. CRU menyediakan berbagai layanan dukungan proses mediasi untuk memastikan praktik-praktik pelaksanaan mediasi terbaik. Layanan ini mencakup menyediakan kerangka kerja untuk asesmen dan mediasi, menciptakan Daftar Asesor dan Mediator Nasional, menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya, serta melakukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman akan konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Laporan lengkap penelitian dan ringkasan eksekutif penelitian ini dapat diunduh di <http://conflictresolutionunit.id>

Catatan untuk Editor:

Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Inggris melalui Unit Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Unit/UKCCU) yang berbasis di Kedutaan Inggris di Jakarta. UKCCU bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya Pemerintah Inggris untuk menghindari bencana perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Francisca Adinda

PRecious Communications for Conflict Resolution Unit, IBCSD

M : +62812 9011 1429

E : francisca@preciouscomms.com